

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjar yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang merupakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang /jasa.
12. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencaanaan, pelaksanaan, pelaporan dan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup evaluasi kinerja Perangkat Daerah mencakup evaluasi antara pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

(2) Hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan peringkat kategori hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pelaksana Evaluasi

Pasal 3

(1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas :

a. evaluasi kinerja semesteran; dan

b. evaluasi kinerja tahunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Bappelitbang, BKD dan PSDM, BPKAD, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait Lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar mulai Tahun 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 30 Tahun 2017
TANGGAL : 2 Juni 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan,sehingga melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
   a. kesungguhan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja benar- benar telah berfokus pada hasil;
   b. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi melalui SAKIP;
   c. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi; dan
   d. keterkaitan di antara perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran, pelaksanaan dan capaian serta pelaporannya.
2. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi kinerja yaitu pencapaian target kinerja organisasi.
3. Evaluasi kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
   a. evaluasi kinerja semesteran, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi mulai bulan januari sampai dengan bulan juni tahun anggaran yang bersangkutan; dan
   b. evaluasi kinerja tahunan, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun.
4. Kriteria dan subkriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah semesteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja Perangkat Daerah beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
   a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 variable yaitu:

1) kriteria; dan

2) sub-kriteria.

b. setiap kriteria dan sub-kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai;

c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk 2 (dua) entitas, yaitu:

1) Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

2) Kecamatan.

d. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Semesteran adalah sebagai berikut :

A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB-KRITERIA	NILAI
1	Perencanaan	25%	Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi	25
2	Pelaksanaan	50%	a. capaian realisasi fisik	5
			b. capaian realisasi keuangan	5
			c. Ketepatan proses pengadaan barang dan jasa	15
			d. jumlah Revisi DPA SKPD	5
			e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung	5
			f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja	5
			g. Pelayanan	5
			h. Realisasi rencana inovasi	5
3	Pelaporan	25%	a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per	5
			b. ketepatan laporan capaian	5
			c. ketepatan laporan capaianfisik	5
			d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja	5
			e. Kelengkapan dokumetasi Perangkat Daerah	5
Jumlah Total		100%		100

B. Kecamatan

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB-KRITERIA	NILAI
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi	25
2	Pelaksanaan	40%	a. capaian realisasi fisik	5
			b. capaian realisasi keuangan	5
			c. ketepatan proses PBJ	5
			d. jumlah Revisi DPA Perangkat	5
			e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung	5
			f. ketepatan capaian rencana aksi kinerja	5
			g. Pelayanan	5
			h. Realisasi rencana inovasi	5

3	Pelaporan	25%	a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan capaian c. ketepatan laporan capaian fisik d. ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja e. Kelengkapan dokumentasi Perangkat Daerah	5 5 5 5 5
4.	Capaian	10%	a. ketepatan Waktu Penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa	10
			b. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD	10
Jumlah Total		100%		100

e. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahunan adalah sebagai berikut :

A. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB-KRITERIA	NILAI
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi	25
2	Pelaksanaan	25%	a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. ketepatan proses pengadaan barang dan jasa c. jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah d. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan	5 10 5 5
3	Pelaporan	15%	a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIMDA	5 10
4	Capaian	25%	a. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RENJA b. capaian kinerja dalam SAKIP c. capaian nilai SKM	10 10 5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5 5
Jumlah Total		100%		100

B. Kecamatan

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB-KRITERIA	NILAI
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA dan Inovasi	25
2	Pelaksanaan	25%	a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa dalam SIRUP	10 5

			c. jumlah revisi DPA Perangkat	5
			d. ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	5
3	Pelaporan	15%	a. ketepatan laporan aset per triwulan	5
			b. ketepatan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan	10
4	Capaian	25%	a. capaian Indikator kinerja organisasi sesuai RENJA	5
			b. Ketepatan waktu penerbitan Hasil Evaluasi Peraturan Desa	5
			c. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD	5
			d. capaian kinerja dalam SAKIP	5
			e. capaian nilai SKM	5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP	5
			b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5
Jumlah Total		100%		100

f. Setiap sub-kriteria akan dibagi kedalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub-kriteria tersebut, dengan nilai ketentuan pemberian nilai sebagai berikut:

1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan;

2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik;

3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup;

4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan

5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk.

g. pada sub-kriteria “jumlah revisi DPA Perangkat Daerah”, apabila revisi DPA Perangkat Daerah disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA Perangkat Daerah tidak diperhitungkan dalam penilaian.

h. dalam kriteria perencanaan, apabila RPJMD dan Renstra belum ditetapkan,maka penilaian kriteria perencanaan hanya dilakukan pada penilaian keselarasan antara DPA dengan RENJA baik pada anggaran murni maupun perubahan.

i. apabila Perangkat Daerah pada tahun berjalan tidak melaksanakan sebagaimana yang tercantum pada keriteria nomor 2 huruf c point 2 (a), maka total penilaian pada sub kriteria tersebut dipersamakan.

j. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja semesteran diatur sebagai berikut:

1) dalam sub kriteria “hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya”, yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada pemeriksaan LKPD; dan

2) dalam sub kriteria yang berkaitan dengan penyampaian laporan maupun input data realisasi akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ;

3) penyampaian laporan atau input data realisasi yang dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditetapkan atau setelah tanggal 15Juli tahun anggaran berjalan, maka diberikan nilai 0 (nol);

4) dalam sub kriteria “capaian realisasi fisik dan keuangan”, apabila target kinerja program/kegiatan tidak tercapai disebabkan Karena kejadian khusus diluar perencanaan ,antara lain perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah yang ditetapkan setelah program/kegiatan berjalan, maka tidak diperhitungkan dalam penilaian;

5) dalam sub sub kriteria “capaian realisasi keuangan”, diberikan batas maksimal efisiensi paling banyak 10%(sepuluhpersen) dari pagu anggaran dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

6) dalam sub-kriteria “proses pengadaan barang dan jasa”hanya dilakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran murni dan tidak mempertimbangkan proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran perubahan.

k. pada sub-kriteria “fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD”, penilaian sub sub kriteria Fasilitasi Serapan DD khusus Tahun Anggaran 2017.

3. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:

a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub-kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu;

b. untuk kriteria yang berhubungan dengankondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan

c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-kriteria yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu dengan total nilai tertinggi 100.

IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI

1. tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah semesteran dan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahunan kepada Bupati;
2. hasil evaluasi kinerja semesteran disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
3. hasil evaluasi kinerja tahunan disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
4. berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

V. PENILAIAN HASIL EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan tingkatan sebagai berikut :

Nilai	90	-	100	=	A
	80	-	<90	=	B
	70	-	<80	=	C
	60	-	<70	=	D
	50	-	<60	=	E

Bagi Perangkat Daerah yang memperoleh predikat tertinggi akan diberikan penghargan dalam evaluasi kinerja semesteran dan evaluasi kinerja tahunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 30 Tahun 2017
TANGGAL: 2 Juni 2017

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTERAN

A. BADAN/DINAS/SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD

NO	KRITERIA/SUB KRITERIA	KATEGORI	NILAI
1.	PERENCANAAN		
a.	Keselarasan RENSTRA – RPJMD	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
b.	Keselarasan RENSTRA - RENJA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
c.	Keselarasan RENJA – RKA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
d.	Keselarasan RKA – DPA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
e.	Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi 5) apabila ada 1 inovasi	5 4 3 2 1
2.	PELAKSANAAN		
a.	Capaian realisasi fisik	1) apabila minimal capaian mencapai 40% 2) apabila capaian antara 35% s/d <40% 3) apabila capaian antara 30% s/d <35% 4) apabila capaian antara 25% s/d <30% 5) apabila capaian <25%	5 4 3 2 1
b.	Capaian realisasi keuangan	1) apabila minimal capaian mencapai 35% 2) apabila capaianantara 30% s/d < 35% 3) apabila capaian antara 25% s/d < 30% 4) apabila capaian antara 20% s/d < 25% 5) apabila capaian < 20%	5 4 3 2 1

c.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui		
		1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya	5
		2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan	4
		3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan	3
		4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan	2
		5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	1
	2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan	5
		2) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan	4
		3) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	3
		4) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan	2
		5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan	1
	b. proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	5
		2) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan	4
		3) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan	3
		4) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan	2
		5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan	1
d.	Jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah	1) apabila tidak ada revisi DPA - Perangkat Daerah	5
		2) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 1 kali	4
		3) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 2 kali	3
		4) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 3 kali	2
		5) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan lebih dari 3 kali	1
e.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung	1) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 80%	5
		2) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d < 80%	4
		3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70 %	3
		4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60%	2
		5) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai < 50%	1

f.	Ketepatan Capaian Rencana Aksi	1) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 60% s/d < 70% 4) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 50% < 60% 5) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai < 50%	5 4 3 2 1
g.	Pelayanan	1) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai ≥ 80% 2) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 50% < 60% 5) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai < 50%	5 4 3 2 1
h.	Realisasi rencana Inovasi	1) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 5 buah 2) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 4 buah 3) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 3 buah 4) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 2 buah 5) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 1 buah	5 4 3 2 1
3.	PELAPORAN		
a.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan	1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi 2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi 3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi 4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi 5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15hari kerja setelah rekonsiliasi	5 4 3 2 1
b.	Ketepatan laporan capaian keuangan	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1

c.	Ketepatan laporan capaian fisik	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1
d.	Ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja	1) apabila laporan lengkap 100% 2) apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan laporan mencapai < 70%	5 4 3 2 1
e.	Kelengkapan Dokumentasi PERANGKAT DAERAH (IKU, Renstra, RKPD, DPA, SOP, Perjanjian Kinerja, SKP, Kode Etik Pegawai, Profil Perangkat Daerah, LHKPN/LHKASN)	1) apabila dokumen lengkap 100% 2) apabila kelengkapan dokumen mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan dokumen mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan dokumen mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan dokumen mencapai < 70%	5 4 3 2 1

B. KECAMATAN

NO	KRITERIA/SUB KRITERIA	KATEGORI	NILAI
1.	PERENCANAAN		
a.	Keselarasan RENSTRA - RPJMD	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
b.	Keselarasan RENSTRA - RENJA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
c.	Keselarasan RENJA–RKA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1

d.	Keselarasan RKA – DPA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan < 70%	5 4 3 2 1
e.	Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi 5) apabila ada 1 inovasi	5 4 3 2 1
2.	PELAKSANAAN		
a.	Capaian realisasi fisik	1) apabila minimal capaian mencapai 40% 2) apabila capaian antara 35% s/d <40% 3) apabila capaian antara 30% s/d <35% 4) apabila capaian antara 25% s/d <30% 5) apabila capaian <25%	5 4 3 2 1
b.	Capaian realisasi keuangan	1) apabila minimal capaian mencapai 35% 2) apabilacapaianantara30%s/d < 35% 3) apabilacapaianantara25%s/d < 30% 4) apabilacapaianantara20%s/d < 25% 5) apabila capaian < 20%	5 4 3 2 1
c.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui		
		1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya 2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan 3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan 4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan 5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	5 4 3 2 1
	2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan 3) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 4) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan 5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan	5 4 3 2 1
	2. proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan 2) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan 3) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan	5 4 3

		4) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan	2
		5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan	1
d.	Jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah	1) apabila tidak ada revisi DPA- Perangkat	5
		2) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 1 kali	4
		3) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 2 kali	3
		4) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan 3 kali	2
		5) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan lebih dari 3 kali	1
e.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung	1) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 80%	5
		2) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d < 80%	4
		3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70 %	3
		4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60%	2
		5) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai < 50%	1
f.	Ketepatan Capaian Rencana Aksi	1) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai ≥ 80%	5
		2) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 70%s/d<80%	4
		3) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 60%s/d<70 %	3
		4) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai 50% < 60%	2
		5) apabila ketepatan capaian kegiatan sesuai rencana aksi mencapai < 50%	1
g.	Pelayanan	1) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai ≥ 80%	5
		2) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 70% s/d < 80%	4
		3) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 60% s/d < 70 %	3
		4) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai 50% < 60%	2
		5) apabila sarana dan prasarana pelayanan lengkap mencapai < 50%	1
h.	Realisasi rencana Inovasi	1) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 5 buah	5
		2) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 4 buah	4
		3) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 3 buah	3
		4) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 2 buah	2
		5) apabila terealisasi kegiatan inovasi mencapai 1 buah	1

3.	PELAPORAN		
a.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan	1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi 2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi 3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi 4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi 5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	5 4 3 2 1
b.	Ketepatan laporan capaian keuangan	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1
c.	Ketepatan laporan capaian fisik	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1
d.	Ketepatan laporan Rencana Aksi Kinerja	1) apabila laporan lengkap 100% 2) apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan laporan mencapai < 70%	5 4 3 2 1
e.	Kelengkapan Dokumentasi Perangkat Daerah (IKU, Renstra, RKPD, DPA, SOP, Perjanjian Kinerja, SKP, Kode Etik Pegawai, Profil Perangkat Daerah, LHKPN / LHKASN)	1) apabila dokumen lengkap 100% 2) apabila kelengkapan dokumen mencapai 90% s/d < 100% 3) apabila kelengkapan dokumen mencapai 80% s/d < 90% 4) apabila kelengkapan dokumen mencapai 70% s/d < 80% 5) apabila kelengkapan dokumen mencapai < 70%	5 4 3 2 1
4.	CAPAIAN		
a.	Ketepatan Waktu Hasil Evaluasi Penerbitan Perdes (RKPDes dan APBDes)	1) Perdes ditetapkan pada bulan November tahun anggaran sebelumnya 2) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Desember tahun anggaran sebelumnya	5 4

		3) Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31 4) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 5) Perdes ditetapkan setelah 15 Januari tahun	3 2 1
b.	Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD		
	1. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD		
		1) apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 7 hari kerja sebelum jadwal yang 2) apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 4 – 6 hari kerja sebelum jadwal 3) apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum1 – 3 hari kerja sebelum jadwal yang ditetapkan 4) apabila waktu pencairan dilaksanakan pada bulan berjalan, maksimal 7 hari kerja 5) apabila waktu pencairan dilaksanakan pada bulan berjalan, lebih dari 7 hari kerja	5 4 3 2 1
	2. Fasilitasi Serapan DD Sesuai dengan jadwal yang ditentukan		
		1) apabila serapan mencapai 80% s/d 100% 2) apabila serapan mencapai 75% s/d < 80% 3) apabila serapan mencapai 65% s/d < 75% 4) apabila serapan mencapai 50% s/d < 65% 5) apabila serapan mencapai < 50%	5 4 3 2 1

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 30 Tahun 2017
TANGGAL : 2 Juni 2017

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUNAN

A. BADAN/DINAS/SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD

NO	KRITERIA/SUB KRITERIA	KATEGORI	NILAI
1.	PERENCANAAN		
a.	Keselarasan RPJMD - RENSTRA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
b.	Keselarasan RENSTRA-RENJA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
c.	Keselarasan RENJA - RKA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
d.	Keselarasan RKA - DPA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
e.	Rencana inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi 5) apabila ada 1 inovasi	5 4 3 2 1
2.	PELAKSANAAN		
a.	Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun		
	1. Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
.	2. Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1

b.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
.	1. Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya	5
		2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan	4
		3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan	3
		4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan	2
		5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	1
	2. ProsesPengadaan Barang dan Jasa		
	a. proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan	5
		2) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan	4
		3) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	3
		4) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan	2
		5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan	1
	b. proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	1) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	5
		2) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan	4
		3) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan	3
		4) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan	2
		5) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan	1
c.	Jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah	1) apabila tidak ada revisi DPA - Perangkat Daerah	5
		2) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 1 kali	4
		3) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 2 kali	3
		4) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 3 kali	2
		5) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan lebih dari 3 kali	1
d.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (triwulan I – IV)	1) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 80%	5
		2) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d < 80%	4
		3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70%	3
		4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60%	2

		5) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <50%	1
3.	PELAPORAN		
a.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan asset per triwulan (triwulan I – IV)	1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi	5
		2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi	4
		3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi	3
		4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	2
		5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	1
b.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan		
	1. Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan	5
		2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya	4
		3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya	3
		4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya	2
		5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	1
	2. Kelengkapan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1) apabila laporan lengkap 100%	5
		2) apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100%	4
		3) apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90%	3
		4) apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80%	2
		5) apabila kelengkapan laporan mencapai < 70%	1
4.	CAPAIAN		
a.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah		
	1. Capaian indikator kinerja organisas isesuai evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah	1) apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100%	5
		2) apabila capaian indikator kinerja 76% s/d 90%	4
		3) apabila capaian indikator kinerja 66% s/d 75%	3
		4) apabila capaian indikator kinerja 51% s/d 65%	2
		5) apabila capaian indikator kinerja < 51%	1
	2. Laporan indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RENJA Perangkat	1) apabila laporan disampaikan tepat waktu, yaitu 5 hari kerja setelah triwulan berakhir	5
		2) apabila laporan disampaikan 6 s/d 8 hari kerja setelah triwulan berakhir	4

	Daerah	3) apabila laporan disampaikan 9 s/d 11 hari kerja setelah triwulan berakhir	3
		4) apabila laporan disampaikan 12 s/d14 hari kerja setelah triwulan berakhir	2
		5) apabila laporan disampaikan lebih dari 14 hari kerja setelah triwulan berakhir	1
b.	Capaian kinerja dalam SAKIP		
	1. Dokumen SAKIP - realisasi kinerja Perangkat Daerah	1) apabila disampaikan tepat waktu, yaitu tanggal 10 setelah triwulan berakhir	5
		2) apabila disampaikan tanggal 11 s/d 15 setelah triwulan berakhir	4
		3) apabila disampaikan tanggal 16 s/d 20 setelah triwulan berakhir	3
		4) apabila diisampaikan tanggal 21 s/d 25 setelah triwulan berakhir	2
		5) apabila disampaikan lebih dari tanggal 25 setelah triwulan berakhir	1
	2. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1) apabila capaian IKU 90% s/d 100%	5
		2) apabila capaian IKU 75% s/d <90%	4
		3) apabila capaian IKU 65% s/d <75%	3
		4) apabila capaian IKU 50% s/d <65%	2
		5) apabila capaian IKU < 50%	1
c.	Capaian nilai SKM	1) apabila nilai SKM 90 s/d 100	5
		2) apabila nilai SKM 80 s/d < 90	4
		3) apabila nilai SKM 70 s/d < 80	3
		4) apabila nilai SKM 60 s/d < 70	2
		5) apabila nilai SKM < 60	1
5.	EVALUASI		
a.	Evaluasi AKIP	1) apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100	5
		2) apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90	4
		3) apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80	3
		4) apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70	2
		5) apabila nilai evaluasi AKIP < 60	1
b.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	1) apabila hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan nihil (tidak ada) dan/atau temuan hasil pemeriksaan hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti / diselesaikan sebelum LHP	5
		2) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan / atau terdapat penyetoran / pengembalian, selesai ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan, terhitung sejak LHP	4
		3) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau terdapat penyetoran / pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2	3

		4) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan / atau terdapat penyetoran / pengembalian, selesai ditindaklanjuti sebelum 1 bulan, terhitung sejak diterimanya LHP	2
		5) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan terdapat penyetoran / pengembalian dan telah ditindaklanjuti sebelum LHP keluar	1

B. KECAMATAN

NO	KRITERIA/SUB KRITERIA	KATEGORI	NILAI
1.	PERENCANAAN		
a.	Keselarasan RPJMD - RENSTRA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
b.	Keselarasan RENSTRA-RENJA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
c.	Keselarasan RENJA - RKA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
d.	Keselarasan RKA - DPA	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1
e.	Rencana inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	1) apabila ada 5 inovasi 2) apabila ada 4 inovasi 3) apabila ada 3 inovasi 4) apabila ada 2 inovasi 5) apabila ada 1 inovasi	5 4 3 2 1
2.	PELAKSANAAN		
a.	Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun		
	1. Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	1) apabila keselarasan mencapai 100% 2) apabila keselarasan antara 90% s/d < 100% 3) apabila keselarasan antara 80% s/d < 90% 4) apabila keselarasan antara 70% s/d < 80% 5) apabila keselarasan< 70%	5 4 3 2 1

	2. Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	1) apabila keselarasan mencapai 90% s/d 100% 2) apabila keselarasan antara 80% s/d > 90% 3) apabila keselarasan antara 70% s/d > 80% 4) apabila keselarasan antara 60% s/d > 70% 5) apabila keselarasan > 60%	5 4 3 2 1

b.	Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	1) RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya 2) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan 3) RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan 4) RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan 5) RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	5 4 3 2 1
c.	Jumlah Revisi DPA Perangkat Daerah	1) apabila tidak ada revisi DPA - Perangkat 2) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 1 kali 3) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 2 kali 4) apabila revisi DPA - Perangkat Daerah dilakukan 3 kali 5) apabila revisi DPA-Perangkat Daerah dilakukan lebih dari 3 kali	5 4 3 2 1
d.	Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	1) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 80% 2) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d < 80% 3) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d < 70 % 4) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60% 5) apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai < 50%	5 4 3 2 1
3.	PELAPORAN		
a.	Ketepatan laporan aset per triwulan	1) apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi 2) apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi 3) apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi 4) apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi 5) apabila laporan disampaikan lebih dari 15hari kerja setelah rekonsiliasi	5 4 3 2 1
b.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1) apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan 2) apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d15 bulan berikutnya 3) apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya 4) apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya 5) apabila laporan disampaikan setelah tanggal	5 4 3 2 1

		25 bulan berikutnya	
4.	CAPAIAN		
a.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RENJA	1) apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100%	5
		2) apabila capaian indikator kinerja 76% s/d 90%	4
		3) apabila capaian indikator kinerja 66% s/d 75%	3
		4) apabila capaian indikator kinerja 51% s/d 65%	2
		5) apabila capaian indikator kinerja < 51%	1
b.	Ketepatan Waktu Penerbitan Hasil Evaluasi Perdes APBDesa	1) Perdes ditetapkan pada bulan November tahun anggaran sebelumnya	5
		2) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Desember tahun anggaran sebelumnya	4
		3) Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	3
		4) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Januari tahun berjalan	2
		5) Perdes ditetapkan setelah 15 Januari tahun berjalan	1
c.	Fasilitasi Serapan ADD dan DD		
	1. Fasilitasi Serapan ADD	1) apabila serapan mencapai 80% s/d 100%	5
		2) apabila serapan mencapai 75% s/d < 80%	4
		3) apabila serapan mencapai 65% s/d < 75%	3
		4) apabila serapan mencapai 50% s/d < 65%	2
		5) apabila serapan mencapai < 50%	1
	2. Fasilitasi Serapan	1) apabila serapan mencapai 80% s/d 100%	5
		2) apabila serapan mencapai 75% s/d < 80%	4
		3) apabila serapan mencapai 65% s/d < 75%	3
		4) apabila serapan mencapai 50% s/d < 65%	2
		5) apabila serapan mencapai < 50%	1
d.	Capaian kinerja dalam SAKIP		
	1. Dokumen SAKIP - realisasi kinerja Perangkat Daerah	1) apabila disampaikan tepat waktu, yaitu tanggal 10 setelah triwulan berakhir	5
		2) apabila disampaikan tanggal 11 s/d 15 setelah triwulan berakhir	4
		3) apabila disampaikan tanggal 16 s/d 20 setelah triwulan berakhir	3
		4) apabila disampaikan tanggal 21 s/d 25 setelah triwulan berakhir	2
		5) apabila disampaikan lebih dari tanggal 25 setelah triwulan berakhir	1
	2. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	1) apabila capaian IKU 90% s/d 100%	5
		2) apabila capaian IKU 75% s/d < 90%	4
		3) apabila capaian IKU 65% s/d < 75%	3
		4) apabila capaian IKU 50% s/d < 65%	2
		5) apabila capaian IKU < 50%	1
e.	Capaian nilai SKM	1) apabila nilai SKM 90 s/d 100	5
		2) apabila nilai SKM 80 s/d > 90	4
		3) apabila nilai SKM 70 s/d > 80	3

		4) apabila nilai SKM 60 s/d > 70	2
		5) apabila nilai SKM > 0	1

E.	EVALUASI		
a.	Evaluasi AKIP	a) apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100	5
		b) apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90	4
		c) apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80	3
		d) apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70	2
		e) apabila nilai evaluasi AKIP < 60	1
b.	Tindaklanjut atas Temuan / Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	a) apabila tidak ada temuan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan atau temuan / rekomendasi / hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan	5
		b) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu perhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat sebelum 1 bulan sejak Laporan	4
		c) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 1 s/d 2 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima	3
		d) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 2 s/d 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima	2
		e) apabila temuan hasil pemeriksaan / rekomendasi / hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dandilaporkan ke Inspektorat lebih dari 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima	1

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN